



ABSTRAK

Illegal fishing atau yang dikenal dengan praktik perikanan IUU (*illegal, unreported, unregulated*) sudah lama terjadi di seluruh wilayah perairan Republik Indonesia. Lemahnya kontrol aparat keamanan serta luasnya wilayah perairan membuat praktik *illegal fishing* semakin meningkat, terlebih di wilayah perbatasan. Perairan Talaud sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Filipina juga memiliki persoalan yang sama. Persoalan *illegal fishing* di perairan Talaud masih terus muncul, meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi fenomena tersebut. Menggunakan pendekatan analisis jaringan dengan riset lapangan secara intensif selama dua tahun sejak 2013 hingga 2014, riset ini bertujuan untuk mengetahui ragam jejaring yang dikembangkan oleh aktor yang terlibat dalam *illegal fishing*, serta mengidentifikasi strategi dan kiat yang dikembangkan oleh para aktor agar kegiatan *illegal fishing* tetap berlanjut.

Riset ini menemukan, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah tersebut terjadi pada tiga level yaitu *illegal fishing* dalam jejaring komunal, *illegal fishing* dalam jejaring asosiasional dan *illegal fishing* dalam jejaring industrial. *Illegal fishing* yang terjadi dalam jejaring komunal dilakukan oleh nelayan kecil (*peasant fisher*) dengan ciri penggunaan alat tangkap tradisional, berskala kecil, area terbatas dan relatif bersifat subsisten. Motif pelaku *illegal fishing* dalam jejaring komunal tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan nelayan perbatasan terkait konsep ilegalitas. Dalam jejaring asosiasional *illegal fishing* terjadi dalam skala yang lebih luas, dilakukan oleh nelayan skala menengah (*post-peasant fisher*) dengan alat tangkap yang lebih modern, serta melibatkan aparat dan pejabat lokal. Sedangkan *illegal fishing* dalam jejaring industrial dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan oknum pejabat tinggi negara pembuat kebijakan di tingkat pusat, serta dilakukan oleh pengusaha dan nelayan skala industri. *Illegal fishing* dalam lingkup industrial murni berorientasi pada pencarian keuntungan finansial dan bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan transnasional.

Kuatnya jejaring *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini tidak dapat dilepaskan dari peranan broker atau perantara yang ada di dalam setiap ragam jejaring. Broker memiliki peran penting menyambungkan aktor-aktor yang terlibat dalam *illegal fishing*, karena kemampuannya di dalam menjembatani kesenjangan struktur sosial yang ada di setiap ragam jejaring *illegal fishing*. Salah satu temuan riset ini adalah peranan broker juga dilakukan oleh aparat negara atau pihak yang terkait dengan aparat negara. Penelitian ini menemukan konfigurasi baru tipe *brokerage; uncertain representative* dan *uncertain gatekeeper* merupakan tipologi baru yang dikembangkan peneliti. Dalam *Uncertain representative* peran broker dimainkan oleh nelayan lokal yang seolah-olah menjadi nelayan Filipina, memiliki dua identitas kenegaraan, sementara dalam *uncertain gatekeeper* peran broker yang dimainkan oleh aparat negara posisinya ambigu, disatu sisi terlihat sebagai pihak yang berada di luar sistem negara, namun kenyataannya adalah perpanjangan tangan pejabat pembuat kebijakan itu sendiri.

Kata kunci: *illegal fishing*, jaringan sosial, broker, wilayah perbatasan.



ABSTRACT

Illegal fishing known as IUU (illegal, unreported, unregulated) fisheries has long been happening throughout the territorial waters of the Republic of Indonesia. Weak control of the security apparatus and the vastness of the territorial waters make the practice of illegal fishing is increasing, especially in the border area. Talaud waters as border regions of Indonesia-Philippines also have the same problem. The problem of illegal fishing in Talaud waters still continues to emerge, although various policies have been taken by the Indonesian government to cope with the phenomenon. Using a network analysis approach with intensive field research for two years from 2013 to 2014, this research aims to determine the range of networks developed by actors involved in illegal fishing, and to identify strategies and tricks developed by actors to keep illegal fishing activities going .

The research found that illegal fishing activities in the area occurred at three levels, namely illegal fishing in communal networks, illegal fishing in associational networks and illegal fishing in industrial networks. Illegal fishing that occurs in communal networks is done by small fishermen (peasant fisher) with the characteristics of the use of traditional fishing gear, small scale, limited area and relatively subsistence. The motives of illegal fishing in communal networks can not be separated from the knowledge of border fishermen related to the concept of illegality. In the associative network of illegal fishing occurs on a wider scale, conducted by post-peasant fisher fishermen with more modern fishing gear, and involving local officials and officials. Meanwhile, illegal fishing in industrial networks is conducted by corporations involving high-ranking officials of policy-making countries at the central level, as well as by industry-scale entrepreneurs and fishermen. Illegal fishing in pure industrial scope is oriented towards seeking financial gain and can be categorized as a form of transnational crime.

The strength of the illegal fishing network in the Indonesia-Philippines border region can not be separated from the role of brokers or intermediaries that exist in every network. Brokers have an important role to connect actors involved in illegal fishing, because of its ability in bridging the social structure gap that exists in every kind of illegal fishing network. One of the findings of this research is the role of brokers is also carried out by state apparatus or parties related to the state apparatus. This study found a new type of brokerage configuration; uncertain representative and uncertain gatekeeper is a new typology developed by researchers. In Uncertain representative the role of broker is played by local fisherman who seems to be a Filipino fisherman, has two state identity, while in uncertain gatekeeper the role of broker which is played by the state apparatus is ambiguous position, on the one hand seen as a party outside the state system but in reality is the extension of the policymaker's own hands.

Keywords: illegal fishing, social network, broker, border area.